



## Temuan BPK, Beberapa Realisasi Dana BOS di Sulut tak Sesuai Aturan

**Manado, KOMENTAR**

Meski tahun 2022, Pemprov Sulut berhasil mempertahankan opini WTP ke-8 secara berturut-turut dari BPK, beberapa catatan perlu menjadi perhatian serius yang harus segera diselesaikan.

Salah satu catatan BPK, sepertinya selalu menjadi langganan setiap tahun yang menuai banyak sorotan publik yakni permasalahan terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sementara itu, Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang dalam sambutannya pada penyerahan opini mengatakan bahwa BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah provinsi Sulut tahun anggaran 2021.

"Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan," ungkapnya.

Adapun pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

"Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara maka hal itu harus

diungkap," tukasnya, seperti dalam rilis resmi yang disampaikan BKP RI, Kamis (13/05)

Adapun beberapa temuan BPK yang perlu menjadi catatan diantaranya pengelolaan pajak dan retribusi

yang belum tertib.

Selain itu, pengelolaan dana BOS masih perlu perbaikan. Pasalnya, masih ditemukan realisasi dana BOS yang tidak sesuai aturan berlaku.

Di samping itu, BPK juga menemukan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun.

Dalam kesempatan terpisah, sejumlah masyarakat menyoroti soal pengelolaan dana BOS yang selalu jadi temuan BPK.

Padahal setiap tahun, Pemprov selalu melakukan Bimtek bagi kepek maupun bendahara dana BOS.

"Kualitas SDM maupun integritas harus terus dibenahi, supaya pengelolaan dana BOS jadi lebih baik," imbau warga.<sup>(17)</sup>